

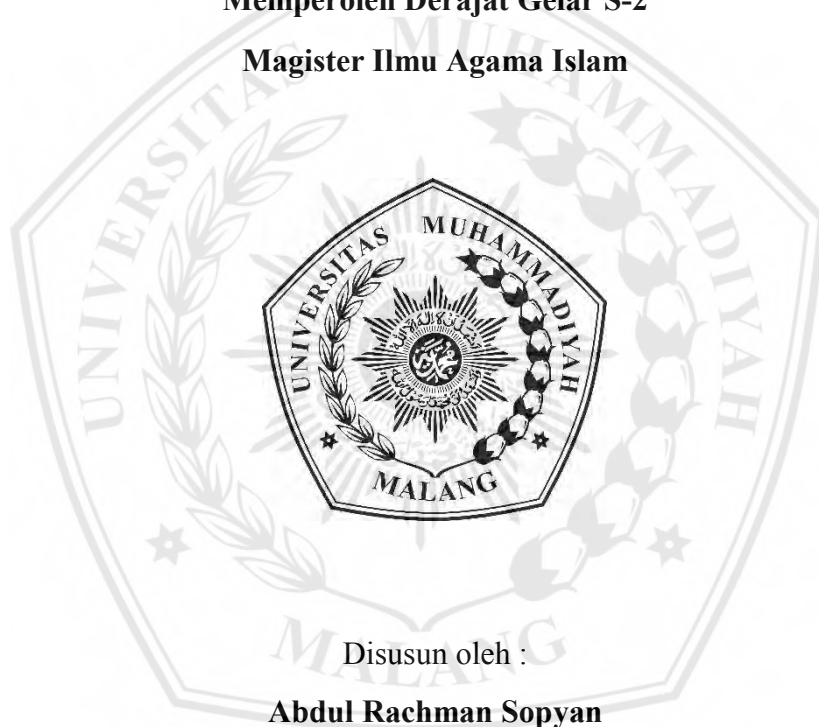
**INTERSEKSI FIQH LINGKUNGAN DAN UNIVERSAL DECLARATION OF  
HUMAN RIGHTS DALAM GERAKAN FRONT NAHDLIYIN UNTUK  
KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Derajat Gelar S-2**

**Magister Ilmu Agama Islam**



Disusun oleh :

**Abdul Rachman Sopyan**

**NIM: 201610290211011**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Maret 2018**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ABDUL RACHMAN SOPYAN**  
**NIM. 201610290211011**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/ tanggal, **Sabtu/ 31 Maret 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/ Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Abdul Haris, M. A**

**Sekretaris : Dr. Pradana Boy ZTF, M. A**

**Penguji I : Prof. Dr. Syamsul Arifin, M. Si**

**Penguji II : Dr. Moh. Nurhakim, M. A**

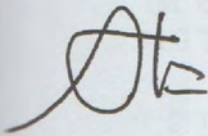
INTERSEKSI FIQH LINGKUNGAN DAN UNIVERSAL DECLARATION OF  
HUMAN RIGHTS DALAM GERAKAN FRONT NAHDLIYIN UNTUK  
KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM

Diajukan oleh:

**ABDUL RACHMAN SOPYAN**  
**NIM. 201610290211011**

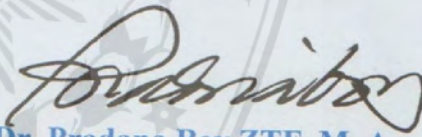
Telah disetujui  
Pada hari/ tanggal: Sabtu/ 31 Maret 2018

Pembimbing Utama



Dr. Abdul Haris, M. A

Pembimbing Pendamping



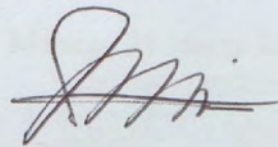
Dr. Pradana Boy ZTF, M. A

Direktur  
Program Pascasarjana



Akhsanul Ummam Ph.D.

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam



Dr. Moh. Nurhakim, M. A



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ABDUL RACHMAN SOPYAN**

NIM : **201610290211005**

Program Studi : **Magister Ilmu Agama Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Tesis dengan judul: **INTERSEKSI FIQH LINGKUNGAN DAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DALAM GERAKAN FRONT NAHDLIYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM** Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat **PLAGIASI**, saya bersedia **TESIS** ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Maret 2018

Yang menyatakan



**ABDUL RACHMAN SOPYAN**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	1
PENDAHULUAN.....	3
KAJIAN TEORI.....	7
METODOLOGI.....	8
TEMUAN PENELITIAN.....	8
<b>Profil Gerakan FNKSDA</b> .....	9
<i>Standing Position</i> FNKSDA.....	9
PEMBAHASAN.....	15
<b>Bentuk Interseksi Fiqh Lingkungan dan UDHR pada Gerakan FNKSDA</b> .....	16
SIMPULAN.....	19
REFERENSI.....	20

## ABSTRAK

Maraknya permasalahan agraria yang berkaitan dengan perampasan atas hak hak sumber daya alam telah memberikan pengalaman penindasan yang mengerikan pada kaum Rentan. Dalam hal ini ada dua pihak yang di rasa seharusnya memiliki andil dalam penyelesaian ini, Negara dan Agama. Negara sebagai pemegang kendali dari pihak yang bertanggungjawab terhadap usaha mensejahterakan rakyat dan Negara sebagai landasan kesadaran etis setiap individu di negeri ini. Namun, keduanya cenderung pasif dan menutup diri dari permasalahan tersebut. Hingga akhirnya muncul berbagai gerakan Islam Progressif yang memberikan kesegaran baru pada jumudnya tafsir-tafsir wahyu perihal akumulasi kepemilikan. Salah satunya adalah FNKSDA. Penelitian ini dilakukan untuk mendedah interseksi gerakan FNKSDA dengan penegakan UDHR dan pengamalan Fiqh Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Analisi wacana Kritis. Pengambilan data beberapa dilakukan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan Interseksi yang Kuat perihal Gerakan FNKSDA dengan penegakan UDHR dan pengamalan Fiqh Lingkungan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UDHR dan juga Syariah memiliki perspektif yang sama dalam memaknai pengelolaan sumber daya Alam demi kemakmuran Masyarakat. Meskipun kenyataannya terjadi penyelewengan nilai nilai di dalamnya di karenakan oleh tata kelola yang tidak memihak rakyat, juga penumpukan akumulasi kepemilikan pada segelintir pihak.

**Kata Kunci:** Fiqh Lingkungan, Universal Declaration of Human Rights

## ABSTRACT

The rise of agrarian problems relating to the appropriation of natural resources have an impact on the live rights to the prosperous sags. The seizure has been giving experience a terrible oppression in the House vulnerable. In this case there are two parties who reasonably should have a share in this settlement, the State and religion. But all tend to be passive against these problems. Until finally appeared various Islamic movements that give new freshness Progressif on stagnation interpretation of revelation about the accumulation of ownership. One of them is the movement of FNKSDA. This research was conducted to explane intersection FNKSDA with the implementation of the UDHR movements and Fiqh of the practice environment. This research uses the methods of critical discourse analysis. Data capture some in-depth interviews conducted with. This research shows a strong Intersection subject is FNKSDA Movements with the UDHR and implementation Fiqh of the environment. This research revealed that the UDHR and also have the same perspective of Fiqh in interpret natural resource management for the sake of the prosperity of the people. Despite the fact that abuses occur the values in it caused by an impartial governance folk, as well as the impact of policies that can only be enjoyed by a handful of parties.

**Keynote:** Fiqh Environment, UDHR, Natural Resources

## PENDAHULUAN

Agama sebagai seperangkat sistem dalam kehidupan manusia telah menyediakan norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Sejak awal perkembangannya agama memberikan banyak tawaran dan alternatif kepada pemeluknya dalam menyelesaikan dan menghadapi kondisi problematis sekaligus agama memegang rumusan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Agama Yahudi, Nasrani dan Islam yang memiliki norma-norma dinamis tersebut menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa disentuh, dijamah dan tidak berarti kaku, saklek. Namun, bukan berarti pula sekaligus menghilangkan sakralitas dari sebuah nilai yang terkandung dalam agama. Sakralitas nilai tersebutlah yang kemudian kerap menjelma pada kelompok-kelompok agama menjadi suatu paham ataupun aliran yang menolak bersikap terbuka atau toleran kepada yang beragama lain dan berkeyakinan berbeda. Sakralitas pada tradisi Ibrahimic dipahami bahwa agama (termasuk kepercayaan Islam didalamnya) berada pada posisi yang konstan dalam kehidupan. Maka agama harus dilihat dari sisi sebabnya dan bukan menjadi sebagai akibat. Islam sebagai agama meyakini penyampaian ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu melalui lisan dan tertulis, sebagaimana yang telah diyakini kebenarannya oleh ummat Islam yakni kitab Al-Quran sebagai sumber primer dalam menjawab problematika yang berkaitan dengan ummat manusia. Sebagai sumber primer dalam agama islam, Al-Quran selalu dihadapkan dengan fenomena-fenomena baru dalam kehidupan manusia. Percepatan dalam perubahan ditataran struktur kehidupan masyarakat islam menjadikan peran rasionalitas ummat islam untuk lebih dikedepankan ketimbang nasfu berebut benar, menolak rasionalitas pada agama artinya menentang perubahan zaman. Kedinamisan sosial masyarakat dan problem pada keummatan yang terus bertambah serta laju teknologi yang berkembang terlampau cepat menuntut pula peran setiap agama –bukan hanya Islam– untuk mampu kembali menjawab kebutuhan zamannya. Tentu untuk menjawab problem perkembangan tersebut yang dibutuhkan pertama kali ialah bagaimana respon ummat islam dalam menghadapinya. Karakter responsif dan reaktif adalah karakter alamiah yang melekat pada manusia. Respon yang cenderung dinamis dan beragam terjadi disebabkan oleh alam naluriah manusia yang



selalu aktif menanggapi perubahan zaman sembari mencari dan merujuk pada sumber nilai yang diyakini.

Dengan pandangan yang kontekstual tersebut Asghar Ali Engineer (2009) berpendapat bahwa justru agama mesti dipandang dalam konteks sosiologis dan juga filosofis. Agama beserta isinya berpotensi dapat menjadi candu atau menjadi kekuatan yang revolusioner yakni *pertama*, semua bergantung pada kondisi sosio-politik yang nyata adanya. Kedua, tergantung pada siapa yang akan melakukan persekutuan dengan agama, apakah mereka yang termasuk kaum revolusioner ataukah mereka yang berpihak ajegnya status quo. Pandangan tersebut selaras pula dengan pendapat Hasan Hanafi (2007) bahwa sebenarnya penyematan kalimat “Islam” pada agama merupakan bentuk deskriptif dari seorang manusia dalam masyarakat, kebutuhan primernya, komitmen moralnya serta aksi sosialnya. Maka, Islam bagi Hanafi sebenarnya lebih dekat pada konsepsi Etika, kemanusiaan atau ideologi.

Posisi Al-Quran yang berhadapan dengan perubahan dan perkembangan zaman jika ditelaah dari perspektif historisnya maka, sesungguhnya merefleksikan “pemberontakan” moral terhadap keangkuhan sistem peradaban masyarakat *jahiliyyah*. Keangkuhan itu dapat dilihat dari perlakuan terhadap kaum rentan khususnya kaum perempuan, baik yang baru lahir, penindasan terhadap suku dan klan yang kecil, peminggiran kaum miskin, pemusatan kekuasaan pada kaum aristokrat, ketimpangan ekonomi. Fenomena tersebut digambarkan oleh Fazlur Rahman dalam membaca ulang (*rereading*) problem akut yang dihadapi masyarakat arab pada kala itu di dalam karyanya *Islam and modernity transformation of an intellectual tradition* (1982) baginya kondisi ketimpangan tersebut sangat tampak dalam surat-surat awal Al-Quran ialah politeisme, eksploitasi kaum miskin, permainan kotor dalam perdagangan dan ketiadaan tanggung jawab umum terhadap masyarakat serta ditambah dengan problem actual lainnya seperti perpecahan dan kecenderungan konflik antar kabilah yang juga mempengaruhi pada potensi perang yang berkepanjangan (seperti perang *Basus* yang berlangsung 40 tahun antara *Bani Bakr* dan *Bani Taghlib* yang hanya disebabkan oleh kematian seekor unta).

Kemudian lebih dalam daripada itu, ialah hadirnya sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya cendekiawan muslim yang oleh Quraish Shihab

ditekankan pada bagaimana memfungsikan kitab suci, yaitu bagaimana menangkap pesan-pesannya dan merakryatkannya, bagaimana memahami dan melaksanakan petunjuk petunjuknya tanpa mengabaikan budaya dan perkembangan positif masyarakat (Shihab: 2013). Pandangan reflektif pada aras historisitas dari Rahman menawarkan pada ummat Islam untuk kembali menangkap makna di setiap ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Quran, spirit tersebut kemudian menjelma dalam satu nilai universal yang oleh Quraish Shihab lebih ditekankan kembali fungsi dan perannya dalam dialektika kehidupan manusia yakni pesan sosial, budaya dan perkembangan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya menangkap makna dari setiap ayat Al-quran dan nilai universalnya ialah dengan merujuk pada system yang ada dalam Islam, yakni Syariah.

Bagi Rahman, agaknya kini ummat Islam perlu mendudukan kembali pentingnya aspek historis sebagai langkah awal untuk mengenal Syariah lebih lanjut. Pada awalnya, pemakaian istilah Syariah ialah sepadan atau sejajar dengan kalimat *Ad-diin*, yaitu prinsip keseluruhan cara hidup. Di masa paling awal yakni setelah wafatnya Rasulullah, dikenal dua sumber atau metode untuk menjelaskan Syariah. Yakni pertama ialah Al Quran dan Sunnah Nabi. Kedua ialah akal atau pemahaman manusia. Pada mulanya pemahaman manusia inilah yang disebut fiqh. Namun dengan adanya pemantapan metodologi islam, maka dari pengamatan Fajlur Rahman, terjadilah perubahan yang radikal dalam wilayah sifat fiqh. Apabila pada mulanya merupakan kegiatan individual, maka pada periode ini ia menjadi suatu disiplin yang terstruktur dan terwujud kumpulan pengetahuan. Selanjutnya, ketika sistem metodologi Islam telah berkembang sepenuhnya, fiqh kemudian menjadi terbatas pada hukum dan yurisprudensi dan akhirnya fiqh diidentikan dengan ilmu hukum (Rahman: 2013).

Menurut Ali Yafie (2006) Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam alquran dan assunnah yang digali secara terus menerus oleh para ahli yang menguasai ilmu hukum. Fiqh diposisikan sebagai pemahaman dari misi dasar islam untuk manusia. Untuk itu, fiqh menawarkan pemahaman dan pemaknaan kehidupan, menawarkan kehidupan yang baik dan karena itu fiqh berbicara secara lugas tentang unsur-unsur kehidupan yang sangat penting, seperti bumi/tanah, tempat hunian untuk manusia, air dan udara.

Upaya untuk mengkontekstualisasikan fiqh dalam skema kekinian tidak bisa dikatakan mudah ataupun sederhana. Sebab, saat ini adalah era globalisasi. Yang mana terminologi “Globalisasi” tersebut terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan *free trade*, yang berhasil ditandatangani kesepakatan secara internasional tentang perdagangan pada bulan April tahun 1994 setelah melalui proses yang cukup sulit, di Marrakesh, Maroko. Yakni suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Ia berupaya mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. Lebih lanjut lagi juga GATT merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah (Fakih, 2013:213). Kemudian di tahun 1995 didirikanlah suatu organisasi pengawasan perdagangan dan control perdagangan dunia yang dikenal dengan World Trade Organizations (WTO) yang kemudian secara kesepakatan pula WTO terlibat dan mengambil alih peran GATT serta mengambil langkah monitoring kepada setiap negara yang berupaya untuk tidak mematuhi kesepakatan pada forum GATT. Secara lebih spesifik lagi, forum-forum globalisasi tersebut terfragmentasi di skop regional Asia pasifik seperti the Asia Pasific Economic Conference (APEC) dan bahkan ada pula forum kesepakatan untuk area pertumbuhan lain yang lebih kecil seperti Singapura, Johor dan Riau (SIJORI) atau yang lain seperti *Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines East Growth Triangle* (BIMPEAGA). Dari proses globalisasi tersebut sangat berdampak langsung pada arah kebijakan negara.

Sejak adanya nota kesepakatan the Bretton Woods di Amerika Serikat dengan ditandai oleh berdirinya IMF dan World Bank, dunia secara global sesungguhnya telah memihak pada kepentingan perusahaan-perusahaan Transnasional (TNC's) yang merupakan aktor penting dari globalisasi. Pada konteks inilah integrasi sistem nasional menuju global berlangsung dan disebut dengan Globalisasi. Adapun dampak yang terjadi setelah proyek globalisasi tersebut dicanangkan ialah lahirnya kebijakan-kebijakan negara yang lebih mengutamakan kekuatan investasi asing dan untuk itu diperlukannya skema reformasi di sektor kebijakan dengan kompensasi mengalirnya hutang dari (Bank Dunia dan IMF). Implikasi dari perubahan tersebut berdampak pada marginalisasi kaum miskin kota, petani kecil, nelayan, pedagang sektor informal serta masyarakat adat,

khususnya dalam hal perebutan sumber daya alam, terutama tanah, hutan, dan laut (fakih: 2013).

## KAJIAN TEORI

Fiqh lingkungan hidup sendiri sejatinya berangkat dari sebuah tujuan besar Syariah atau *Maqoshid Syariah*, yakni hal ikhwal yang berkaitan dengan penataan kehidupan manusia secara utuh dan yang jika dicermati dalam tujuan tersebut terdapat empat butir pokok yakni; *Rub'u al ibadat*: penataan antara relasi manusia sebagai Hamba dengan Allah SWT, *Rub'u al mu'amalat*: penataan relasi antara dengan sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, *Rub'u al munakahat*: penataan relasi manusia dengan keluarganya, *Rub'ul al Jinayat*: penataan pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan, ketentraman dalam kehidupan (Yafie, 2006: 159).

Sementara ditataran *standing position* dari fiqh lingkungan sendiri ada pada skop pondasi moral. Di mana fiqh difungsikan untuk mendukung segala upaya yang telah dilaksanakan dan yang faktanya belum mampu mengatasi problem kerusakan lingkungan hidup yang telah ada dan terus menerus berlangsung. Untuk itu fiqh lingkungan berusaha untuk menghidupkan kembali kesadaran akan pentingnya menjaga, merawat dan melindungi lingkungan hidup dari keserakahan dan eksploitasi. Fiqh lingkungan sendiri berdiri di atas enam prinsip dasar kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan hidup yakni:

- 1) Perlindungan Jiwa Raga (*hifdh al nafs*) ialah kewajiban yang utama.
- 2) Kehidupan dunia bukanlah tujuan. Kehidupan dunia hanyalah titian untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal.
- 3) Produksi dan konsumsi haruslah sesuai dengan standar kebutuhan layaknya manusia (*Hadd al-kifayyah*). Yang artinya, setiap yang melampaui batas standar kebutuhan layaknya manusia harus dilarang.
- 4) Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

- 5) Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu.

Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di Akhirat.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah studi pemikiran. Studi pemikiran dalam FNKSDA merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna, dan nilai yang diperjuangkan (Kaelan, 2005:5). Paradigma penelitian kualitatif menggunakan kerangka berpikir induktif. Dalam hal ini abstraksi disusun peneliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan Data dalam Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, Subjek Penelitian adalah beberapa Punggawa FNKSDA yakni Muhammad AL-Fayyad, dan Roy Murthado. Selain itu peneliti juga menganalisa laporan advokasi serta berbagai tulisan yang di tulis oleh FNKSDA di media.

## **TEMUAN PENELITIAN**

Secara Terminologi, kata Front tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kata ini merujuk pada arti gerakan kesatuan atau gerakan bersama dalam mencapai suatu tujuan politik atau ideologi. FNKSDA atau Front Nahdiyyin untuk keselamatan Sumber daya merupakan Gerakan yang hadir dari dalam tubuh para santri Nahdlatul Ulama. Mereka secara khusus menunjukkan perhatiannya untuk terus memantau berbagai isu yang berkaitan dengan Sumber daya Alam. FNKSDA. Adapun berbagai data yang di dapatkan peneliti selama di lapangan adalah sebagai berikut. FNKSDA sendiri merupakan gerakan non struktural NU yang latar belakang aktornya adalah sekumpulan pemuda NU yang peduli dengan ketidakberdaulatnya posisi Indonesia terhadap keberadaan industri ekstraktif diberbagai daerah. Tujuan berdirinya FNKSDA adalah mewujudkan tata kelola SDA yang berkedaulatan dan sebesar-besarnya bermanfaat bagi



rakyat Indonesia secara agama dan kultural tanpa terlibat hubungan formal dengan pemerintah.

### **Profil Gerakan FNKSDA**

Seperti yang dijelaskan di atas FNKSDA hadir dari dalam tubuh Nahdlatul Ulama secara kultural. Meski menggunakan kata Nahdliyin di dalam nama gerakan mereka, FNKSDA bukanlah Banom Nahdlatul Ulama ataupun memiliki relasi struktural apapun dengan Nahdlatul Ulama. Seperti yang tertulis dalam web Daulathijau.org, Front ini adalah wadah koordinasi antara Jamaah NU yang memiliki kepedulian terhadap konflik pengelolaan sumberdaya alam (SDA), seperti udara, air, tanah, dan segala yang terkandung di dalamnya, khususnya yang dialami pada basis jamaah NU (Daulat Hijau: 2018). Awal mula kelahiran Front ini ditandai oleh diskusi tematik bertajuk “NU dan Konflik Tata Kelola SDA” yang diadakan di Pendopo LKiS, Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2013 yang membahas kasus agrarian di berbagai daerah di Indonesia. Diskusi sepakat untuk membentuk aliansi dengan tujuan menyiapkan media jaringan untuk kelancaran sirkulasi informasi dan kemudahan pengorganisasian serta mengarusutamakan tata kelola SDA di kalangan NU.

Jadi, FNKSDA merupakan kumpulan santri dan Jemaah Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus terhadap isu-isu Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lambat laun organisasi ini berkembang, tidak hanya di Yogyakarta, organisasi ini telah ada di berbagai kota di Indonesia, seperti Jombang, Bandung, Probolinggo dan Malang. Gerakan mereka pun bertransformasi dari yang mulanya sekedar diskusi, kini telah bertambah menjadi gerakan advokasi dan perorganisasian rakyat. FNKSDA kini telah hadir bersama Rakyat menangani berbagai masalah pengelolaan Sumber Daya Alam dan isu Agraria lainnya. FNKSDA kini telah memiliki basis di berbagai kota dan beberapa dampingan rakyat yang menghadapi masalah masalah Agraria dan salah satunya problem pengelolaan Sumber Daya Alam. Seperti pendampingan pada kasus kasus Kendeng, Kulon progo, Tumpang Pitu, Tamansari, dan banyak kasus lainnya, FNKSDA hadir mengadvokasi dan mengorganisir rakyat.

### ***Standing Position* FNKSDA**

FNKSDA seperti yang di jelaskan sebelumnya tidak memiliki ikatan struktural dengan Nahdlatul Ulama, bahkan sekilas terkesan berseberangan dengan Nahdlatul

Ulama perihal kedekatan dengan Pemerintah. Sejauh ini Nahdlatul Ulama menjadi salah satu Organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah dan juga aparaturinya. Keduanya memiliki pengaruh yang kuat satu sama lain. Berbeda 180 derajat, FNKSDA hadir sebagai organisasi penekan pemerintah yang sering kali dalam berbagai upaya pengorganisirannya sering bersitegang dan bersinggungan dengan pemerintah dan aparaturinya. FNKSDA memandang perlunya pembaharuan dalam tubuh Islam sendiri, salah satu Presidium Nasional, Roy Murtadho mengungkapkan Bahwa fenomena absennya organisasi Islam dalam membela kepentingan umatnya adalah persoalan serius bagi muslimin sekarang ini. Ia selanjutnya mengungkapkan bagaimana Islam yang pada awalnya bergerak dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan politik Quraish yang sewenang-wenang dan opresif. Namun terlihat berbalik pada hari ini. Gerakan gerakan Islam hari ini cenderung politis dan cenderung apatis terhadap segala bentuk pengalaman kaum muslim rentan. Hal ini di perparah dengan dalih bahwa kediaman mereka merupakan sebuah bentuk pelaksanaan nilai *Rahmatan Lil-Alamin* yang diartikan sebagai sikap welas asih termasuk pada musuh akan terluka oleh perlawanan fisik.

Bagi FNKSDA realitas ini sangat mengkhawatirkan, kenyataan dianggap sebagai upaya pembatasan dan reduksi terhadap Gerak Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam. Karena kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya sekedar bersikap kooperatif dan welas asih kepada musuhnya (baca kisah Perjanjian Hudaibiyah dan Fath Makkah), Nabi Muhammad SAW. juga tidak segan-segan untuk melawan bahkan memerangi “rezim despot” kuffar Makkah untuk membela umatnya (baca kisah Perang Uhud yang salah satunya bermula dari pengkhianatan Yahudi Madinah). Dari pernyataan Roy Murtadho ini dapat dipahami bagaimana FNKSDA memandang umat Islam sekarang telah melucuti elemen progresif Nabi Muhammad SAW. *Rahmatan lil ‘alamin* telah dimaknai sebagai pasifisme, ketidakberdayaan, kerapuhan dan lari dari kenyataan (escape from reality). Padahal jika kita kembali membaca sejarah awal Islam akan mendapati kenyataan yang jauh berbeda (Murthado: 2017).

Yang perlu ditekankan dalam sejarah Islam adalah bahwa golongan elit bukanlah yang mendominasi dari *as-sabiqun al-awwalun* atau pemeluk Islam generasi pertama. Melainkan, diantara mereka juga ada golongan proletariat seperti diantaranya Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir yang merepresentasikan golongan budak. Rasulullah sendiri

meskipun berasal dari kabilah Quraisy, kabilah yang terpandang di antara kabilah-kabilah lainnya, tidak datang dari keluarga kaya. Rasulullah tetap harus menjadi pekerja keras dan buruh pada para pamannya dan keluarga Nafisa yang kelak akan jadi mertuanya.

Banyaknya kaum miskin yang memeluk Islam dirasa Murthado, dikarenakan keyakinan mereka bahwa Islam akan membawa perubahan dalam masyarakat. Islam akan membawa masyarakat kepada kesetaraan dalam segala hal. Misi tersebut mendapatkan penolakan dari kaum musyrik. Sebab, bukan hanya mengancam kepercayaan terhadap leluhurnya akan tergeser melainkan juga akan terjadinya revolusi sosial yang dapat meruntuhkan tatanan sosial kala itu: derajat tuan borjuis setara dengan budak proletar, posisi laki-laki akan setara dengan perempuan kala itu.

Selain itu FNKSDA sendiri memandang ada kekosongan gerakan perlawanan cendekiawan muslim terhadap berbagai eksploitasi yang terjadi salah satunya, dikarenakan mereka menjadikan frasa “Teologi Pembebasan” dalam Islam tak lebih hanya sebagai cara pandang, pisau analisis dan bukan sekaligus sebagai landasan pergerakan. Tak ayal, komentar sinis pun bermunculan mengenai sikap gerakan Front Nahdliyyin ketika membela umat tertindas. Selain itu, tindak apatisisme justru hadir dari para cendekiawan NU dikarenakan mereka lebih menghabiskan energi dalam pusaran politik identitas. Serta berkubang dalam kenyataan bagaimana, NU muncul untuk menghadang laju Wahabisasi. Akan tetapi, bukankah selanjutnya NU meletakkan dasar gerakannya di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi yang berpusat pada kebutuhan umat, sebagaimana yang termaktub dalam *Khittah Nahdliyyah*. FNKSDA menilai jika kita melihat kritik Hasan Hanafi perihal revolusi pemikiran ini relevan dalam NU. Dalam *Bahtsul Masa'il* yang diselenggarakan di muktamar lalu, terdapat pertanyaan mengenai hukum alih kuasa lahan dan beberapa pertanyaan Kedaulatan Hijau. Seharusnya pasca kajian tersebut NU memulai langkahnya dalam memperjuangkan hak para petani dan melawan cengkeraman tangan kapitalisme yang kini menguasai industri ekstraktif. Atau setidaknya mampu membuat formulasi Fiqh Air sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 2014.

Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. NU, belum mampu bergerak dari aras pemikiran menuju dimensi tindakan. Ini dibuktikan dengan tiadanya advokasi untuk para petani dan buruh yang sering dieksploitasi. Alih-alih advokasi, NU sendiri belum

mengeluarkan satu pun statement yang berisi dukungan kepada para petani tersebut. Jadi menurut Murthado jangan disalahkan jika pada akhirnya para petani dan buruh ini merasa pesimis dengan NU struktural dan mengeneralisasi islam karenanya. FNKSDA hadir bukan sebagai gerakan separatis dari tubuh NU, lebih dari itu FNKSDA berusaha Hadir sebagai representasi Nahdhiyin yang ramah terhadap kaum rentan. Istilah teologi pembebasan merupakan istilah baru dalam Islam. Namun demikian bukan berarti Islam tidak pernah melakukan upaya pembebasan. Bahkan bisa dikatakan bahwa lahirnya Islam adalah atas nama pembebasan. Pada zaman kenabian Muhammad, sistem politik ekonomi yang digunakan adalah sistem oligarki, yaitu akumulasi kepemilikan hanya hadir kepada para pembesar kafir Quraisy. Akan tetapi, setelah kepergian Rasulullah, Islam kehilangan elemen vitalnya. Salah satunya dalam konsep teologinya.

Teologi Islam bergeser dari konsen pada keadilan sosial dan ekonomi politik menjadi konsen pada problem eskatologis dan problem keduniawian. Teologi Islam yang tumbuh kemudian berkecenderungan menggunakan metode spekulatif dan skolastik. Muawiyah bin Abu Sufyan lah pemantik dari zamannya hingga terus berangsur. Hingga kemudian Teologi Islam mulai berketat dalam masalah kehendak bebas yang dihadapkan juga ketundukan pada takdir. FNKSDA menilai Islam yang dekat dengan penguasa ini kemudian kehilangan aspek pembebasannya. Para Khalifah Umayyah lebih sering duduk bersama para penguasa yang tiran, sekaligus menindas siapa yang melawan mereka. Jumlah budak berlipat ganda. Harem menjadi budaya istana Khalifah. Sedangkan orang non-Arab mendapat perlakuan eksploitatif. Selain itu dari Muhammad Al-Fayyadl Presidium Nasional FNKSDA memaparkan lebih detail perihal standing Position FNKSDA sebagai Gerakan Pembebasan, ia mengungkapkan bahwa sebelum bertanya tentang Islam dan pembebasan rakyat pekerja, agaknya perlu mempertanyakan tentang cara Islam memandang dan menempatkan pembebasan. Pembebasan dalam arti umum juga dalam arti luas dan umat Islam perlu mendedah itu semua, sementara jika tidak dipertanyakan maka, hanya akan kembali kepada perspektif yang terpisah, parsial dan cenderung fragmentatif. FNKSDA sendiri memulai dari pertanyaan: dimana diletakkan “pembebasan”, apakah ia dampak atau tujuan dalam agama Islam? Apakah efek atau tujuan utama misi kerasulan Nabi Muhammad SAW? Jika upaya pembebasan itu adalah tujuan, adakah pernyataan eksplisit tentang itu dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam Al-Qur'an terdapat kata "*at-tahrir*" yang berarti "pembebasan". Dalam beberapa teks Al-Qur'an berbicara tentang pembebasan budak (*tahrir raqabah*). Tapi bagaimana istilah tersebut dipahami? FNKSDA cenderung memahami pembebasan sosial merupakan efek dari misi yang sejak awal melatar belakangi misi kenabian, yaitu tauhid. Sejauh ini pemahaman yang muncul dari umat Islam adalah Pembebasan sosial baru dibicarakan setelah selesainya persoalan Tauhid terlebih dahulu. Seperti yang diketahui, tauhid adalah pembebasan dari belenggu politeisme. Secara sosial, politeisme adalah ajaran yang memberi legitimasi bagi dominasi yang kuat terhadap yang lemah. Al Fayyadh menyebut istilah 'antagonisme ontologis', di mana alam adalah pertarungan di antara para dewata yang satu sama lain berebut kuasa dan saling menaklukkan. Tauhid adalah koreksi atas visi antagonistik itu. Dengan adanya tauhid dalam misi kenabian, Islam membebaskan ketergantungan manusia terhadap kekuatan-kekuatan eksternal selain Tuhan itu sendiri. Disini muncul tugas kelanjutan umat Muslim untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Urusan langit diselesaikan secara bersamaan dengan urusan bumi. Yang menarik adalah bagaimana dengan berangkat dari realitas masyarakat Arab saat itu, serta masyarakat-masyarakat pra-Arab yang dikisahkan Al-Qur'an, untuk menjawab problem patologis social masyarakat arab (kasta-kasta sosial yang didasarkan pada pemilikan pribadi, sentimen kesukuan, atau pengaruh politik.), sesungguhnya Islam telah menawarkan solusi. Islam memberikan alternatif solusi dengan pola perubahan bertahap dari pranata lama yang telah membelenggu. Misal, terhadap problem akumulasi kepemilikan (*al-takatsur*), Islam menawarkan solusi melalui zakat dan infaq. Terhadap model hierarki sosial, Islam menawarkan cara pengorganisasian masyarakat atas rekonstruksi status sosial dan kelas, melalui musyawarah (*syura*), kesamaan hak dan kewajiban Muslim dihadapan hukum.

Dalam Hal Ini FNKSDA menunjukkan keteguhan posisinya dalam menafsirkan Islam secara Progressif meskipun itu harus bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama.

Pandangan FNKSDA mengenai Keadulatan Sumber Daya Alam Beberapa waktu yang lalu FNKSDA bereaksi pada kasus Tumpang Pitu. FNKSDA menilai bahwa yang terjadi diwilayah Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi ialah merupakan salah satu gambaran kecil saja dari besarnya perusakan lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan besar. Bahkan secara Frontal FNKSDA mengungkapkan bagaimana setiap



wilayah yang memiliki sumber daya alam telah dikuasai oleh berbagai korporasi ekstraktif. Juga bagaimana penguasaan oleh perusahaan-perusahaan tambang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, namun juga sangat merugikan negara dan mengempatkan Rakyat sebagai terampas dan juga terdampak. Selain itu FNKSDA juga bereaksi pada, penambangan Batubara Di Samarinda, Kalimantan Timur. Bagi FNKSDA tambang tidak hanya merusak lingkungan melainkan akan berpotensi pula untuk membunuh puluhan anak-anak terjatuh di bekas galian tambang yang dibiarkan menganga tanpa pemulihan.

FNKSDA juga kerap kali bereaksi terhadap isu Kedaulatan negara, seperti yang sering kali dibicarakan, di hadapan institusi ekonomi global seperti WTO, World bank dan IMF menjadi semu dan tak berarti apa-apa. Mengenai tata kelola Sumber Daya Alam, FNKSDA berkaca pada seorang ulama besar, Wahbah Al-Zuhailly yang mengungkapkan bagaimana sumber daya alam semestinya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh orang segelintir pihak atau berakumulasi dalam kepemilikan swasta. Selain Wahbah Al-Zuhailly datang dari kalangan madzhab Hambali dan Maliki juga melihat ciptaan Allah, berkaitan dengan sumber daya alam semisal tambang, bebatuan, air, rerumputan idealnya di tata kelola oleh Negara.

Lebih Lanjut Al Fayyadl menilai keberangkatan FNKSDA dimulai dari kekhasan yang mereka miliki, kekhasan yang melihat bagaimana kebutuhan tidak lagi terpaut pada 'teologi pembebasan', melainkan 'Fiqh Pembebasan'. Istilah 'teologi' dirasa oleh Al Fayyadl terlalu rumit dan abstrak bagi umat Islam. Berbeda dengan 'Fiqh' yang lebih mudah dipahami. Ini mengingat, latar belakang umat Muslim di Indonesia yang kesadarannya lebih banyak dibentuk oleh hukum Islam daripada perdebatan soal akidah. Jadi FNKSDA hadir untuk menawarkan alternatif baru, dan menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya telah sangat lengkap dalam mengatur upaya pengelolaan Sumber daya Alam.

## PEMBAHASAN

Pada UDHR Pasal 25 ayat 1 disebutkan *“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya”*. Secara Eksplisit UDHR memang belum menyebutkan kedaulatan sumber daya alam sebagai salah satu hak fundamental individu. Namun ternyata Pasal 25 ayat 1 UDHR telah menunjukkan implikasi urgensi tata kelola sumber daya Alam. Pada beberapa negara terutama negara dunia ketiga menggantungkan langsung pangan mereka pada sumber daya Alam tanpa melibatkan industri dan korporasi di dalamnya. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Roy Murthado di atas. Sangat mustahil kita menemukan wilayah yang memiliki sumber daya alam belum diincar oleh korporasi ekstraktif.

Secara Eksplisit UDHR memang belum menyebutkan kedaulatan sumber daya alam sebagai salah satu hak fundamental individu. Namun ternyata Pasal 25 ayat 1 UDHR telah menunjukkan implikasi urgensi tata kelola sumber daya Alam. Pada beberapa negara terutama negara dunia ketiga menggantungkan langsung pangan mereka pada sumber daya Alam tanpa melibatkan industri dan korporasi di dalamnya. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Roy Murthado di atas. Sangat mustahil kita menemukan wilayah yang memiliki sumber daya alam belum diincar oleh korporasi ekstraktif. Dalam kenyataannya Negara yang seharusnya hadir dalam persoalan ini untuk membebaskan rakyat dalam persoalan perampasan sumber daya Alam. Justru menjadi salah satu aktor penindasan di dalamnya. Lebih lanjut ormas Islam seperti yang disebutkan di atas seringkali memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, justru bersikap apatis dan enggan untuk memperbincangkan perihal isu yang cukup mendasar ini.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam bab II penelitian ini adalah Dalam kaitannya dengan lingkungan KH. Ali Yafie (2006:159) berangkat dari sebuah pandangan bahwa yang menjadi titik awal dari problem lingkungan bukanlah sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan atau pelestarian alam dan sejenisnya,

melainkan adalah bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri. Sebab, persoalan lingkungan hidup ialah merupakan kritik dari adanya kesenjangan yang diakibatkan oleh adanya pemujaan secara berlebih terhadap teknologi dan adanya struktur yang tidak adil akibat dari kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi. Fiqh lingkungan hidup sendiri sejatinya berangkat dari sebuah tujuan besar Syariah atau *Maqoshid Syariah*, yakni hal ikhwal yang berkaitan dengan penataan kehidupan manusia secara utuh dan yang jika dicermati dalam tujuan tersebut terdapat empat butir pokok yakni; *Rub'u al ibadat*: penataan antara relasi manusia sebagai Hamba dengan Allah SWT, *Rub'u al mu'amalat*: penataan relasi antara dengan sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, *Rub'u al munakahat*: penataan relasi manusia dengan keluarganya, *Rub'ul al Jinayat*: penataan pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan, ketentraman dalam kehidupan (Yafie, 2006: 159).

Dalam Hal ini sesungguhnya Syariah memiliki interseksi yang cukup kuat. Syariah secara khusus telah mengatur bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya Alam diatur oleh Negara seperti halnya disebutkan di atas bagaimana Wahbah Al-Zuhaily yang mengungkapkan perihal perlunya tata kelola sumber daya alam semestinya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh orang segelintir pihak atau berakumulasi dalam kepemilikan swasta. Dan hari ini tata kelola memang diserahkan Pada Negara. Namun, negara masih belum mampu mendistribusikan hasil tata kelola Sumber Daya Alam untuk menyejahterahkan rakyatnya. Lebih dari itu negara justru ikut andil dalam upaya-upaya akumulasi kepemilikan oleh segelintir golongan. Dari sini menunjukkan bagaimana telah terjadi penyelewengan hukum syariah berkaitan dengan sumber daya Alam sekaligus telah terjadi pendiaman negara terhadap upaya perampasan hak Sumber daya Alam besar besaran di Indonesia.

### **Bentuk Interseksi Fiqh Lingkungan dan UDHR pada Gerakan FNKSDA**

FNKSDA dalam gerakannya menekankan Islam tak hanya sekedar ritual, tapi sebagai pembebasan dari berbagai krisis sosial-ekologis di Indonesia oleh rezim pro pasar yang didukung aliansi kelas borjuis, kelas kapitalis asing dan elit agama. Menurut Roy Murthado mengungkapkan gerakan FNKSDA ada untuk melawan perselingkuhan politik,

ekonomi dan agama untuk mengakumulasi kapital kelas-kelas elit melalui jargon-jargon nasionalisme dan agama.

Relitasnya agama kini telah bertransformasi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menyajikan metode perlawanan namun di sisi lain juga bisa menjadi alat penindasan terhadap rakyat dengan memberi legitimasi teologis kelas elit oligarki. Roy murthado mengajukan pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa ormas Islam di negeri ini absen dari berbagai bentuk perjuangan rakyat di segala aspeknya? Bahkan, sebagaimana telah saya kemukakan di muka, elit agama justru menjadi bagian dalam aliansi kelas borjuasi nasional dan kelas kapitalis asing, dengan menempatkan dirinya, secara langsung maupun tidak sebagai penjaga kepentingan mereka dengan memberi legitimasi teologis bahwa logika perampasan atau perusakan sah menurut suara langit, setidaknya tak ada yang protes ketika ada penjarahan tanah petani. Sehingga sampai sekarang tidak ada ormas besar Islam di Indonesia yang secara eksplisit memberi dukungan pada perjuangan petani Kendeng.

Absennya ormas-ormas besar Islam di Indonesia terhadap berbagai problem aktual umat, setidaknya menandakan empat hal: *pertama*, secara internal, ormas-ormas Islam mengalami kegagalan mengaktualkan konsep Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* dalam konteks kapitalisme global. *kedua*, ormas-ormas Islam menghabiskan sebagian besar energinya untuk persoalan-persoalan identitas dengan melepaskan aspek kelas sebagai dasarnya, sehingga gagal dalam mematerialkan konsep *mustadh'afin* sebagai proletariat dan informal proletariat dalam struktur relasi sosial produksi kapitalisme. *Ketiga*, ormas-ormas Islam kebingungan menempatkan posisinya di tengah politik liberal dan negara pasar. Di satu sisi secara teologis-dogmatis agama menganjurkan perjuangan membela umat, tapi secara praksis sebaliknya, disadari atau tidak ormas-ormas Islam turut menyokong liberalisasi ekonomi yang menyengsarakan umat. *Keempat*, kekeliruan memahami kebijakan pemerintah sebagai negara itu sendiri. Keempatnya menimbulkan efek kelima, elit agama, alih-alih memperjuangkan hak-hak rakyat, justru turut menyokong oligarki, melalui instrumen negara, untuk menguasai hampir sebagian besar aset sumber daya di Indonesia. Beberapa persoalan inilah yang memandulkan Islam sebagai jalan pembebasan, sehingga tidak mampu melihat wajah sang *mustadh'afin*

seperti Yu Patmi (yu Patmi adalah perempuan kendeng, ia pejuang hak katas lingkungan dan penolak perampasan ruang, penolak pembangunan pabrik semen di rembang Jawa Tengah yang wafat saat melakukan aksi tuntutan di depan Gedung istana negara) dan jutaan kaum informal proletariat dan proletariat yang disingkirkan melalui kebijakan pemerintah yang pro pemodal.

Jika dikaitkan dengan peran elan vital Islam maka, penting pula ditekankan di sini sosok Nabi Muhammad SAW. sebagai seorang Rasul, Rasulullah lebih tepat disebut sebagai seorang aktivis-pejuang ketimbang seorang guru-petapa yang mengisolasi dirinya dari persoalan dunia. Sehingga melalui sosok egaliternya yang juga lahir dari kalangan kaum miskin, sebagaimana kebanyakan masyarakat Arab lainnya yang dihinakan, masyarakat Arab mempunyai kekuatan menyusun perjuangan pembebasan bagi dirinya sendiri maupun membebaskan orang-orang lain dari kekejaman Kekaisaran Romawi di Barat dan dinasti Sassanid di Timur. Dari praksis perjuangan pembebasan seperti inilah pada masanya tradisi pembebasan Islam muncul, bukan dari suatu pencarian abstraktif-kontemplatif. Bahkan pesan pembebasan dalam Islam merupakan kunci dari ajaran Islam itu sendiri. Karena di dalam pembebasan tersebut terkandung cinta kasih dan keadilan. Ada dua kata yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menyatakan keadilan, yaitu *'Adl* dan *Qist*. *'Adl* tak hanya berarti keadilan tapi juga mempunyai makna menyamakan dan meratakan. *'Adl* dimaknai sebagai lawan "*zhulm*", perbuatan salah dan penindasan. "*Qist*" juga berarti distribusi yang sama dan juga keadilan, kewajaran, dan pemerataan. Kedua kata ini menjadi kata kunci bagi kaum *mustadh'afin* berjuang melepaskan dirinya dari belenggu penindasan.

Dalam Hal ini sesungguhnya FNKSDA telah menjadi gerakan yang cukup merepresentasikan dari kontekstualisasi fiqh dan turut serta dalam memperjuangkan, mempromosikan Hak Asasi Manusia. Sehingga dianggap layak dan patut untuk diperdalam kajian interseksi didalamnya. Sebagai bagian dari tubuh NU (Nahdlatul Ulama), sejatinya FNKSDA menginginkan adanya sikap dan responsibilitas terhadap fakta ekonomi-politik yang terjadi hingga kini. Dimana NU perlu merespon secara kreatif dan serius atas tantangan terhadap gelombang Globalisasi Neoliberal dan gelombang Globalisasi di tubuh Islam itu sendiri. Dampak dari globalisasi tersebut ada pada



hubungan Indonesia dengan negara-negara pusat; neoliberalisme bekerja di level nasional dan karenanya berdampak secara nasional dalam hubungan antar kelompok di Indonesia; dan neoliberalisme berdampak pada tataran praksis di kelompok-kelompok sosial di Indonesia seperti masyarakat NU (Ridwan: 2008). Dari sini terlihat lokus perjuangan FNKSDA yang berada dalam Interseksi antara penegakan nilai-nilai Syariah, kerangka Fiqh Lingkungan, dan juga Penegakan dengan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan sumber daya Alam.

## **SIMPULAN**

Dari pemaparan berbagai temuan di atas. Maka peneliti menemukan beberapa simpulan kunci mengenai Interseksi antara Fiqh Lingkungan dengan UDHR, Di antaranya sebagai berikut:

1. Pandangan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam terhadap Fiqh Lingkungan dan Universal Declaration of Human Rights bahwa keduanya telah embodied dengan konsepsi Syariah yang dipahami sehingga posisi dari pada hak asasi manusia berfungsi menjadi argumentasi hukum yang berlaku dalam tataran internasional.
2. Pandangan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam terhadap Fiqh Lingkungan dapat disimpulkan sesungguhnya telah ada dan mampu menjadi landasan pembahasan isu utama bagi gerakan Islam. Hal ini menjadi sebuah Fenomena kepedulian organisasi Islam dalam membela kepentingan umatnya. Islam yang pada awalnya bergerak dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan politik Quraish yang sewenang-wenang dan opresif. Namun terlihat berbalik pada hari ini. Di tengah Gerakan-gerakan Islam hari ini cenderung politis pragmatis dan memiliki kecenderungan apatis terhadap segala bentuk pengalaman kaum muslim rentan di sektor Agraria, perampasan ruang hidup.

## REFERENSI

- Akhtar, Muhammad Ramzan. (1996) *Towards an Islamic Approach For Environmental Balance. Islamic Economic Studies. Vol. 3, No. 2, June.* School of Economics, International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad.
- Ali Engineer, Asghar. (2004) *Islam Masa Kini.* Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Ali Engineer, Ashghar. (2009) *Islam dan Teologi Pembebasan.* Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Alkatiri, Zeffry. (2010) *Belajar Memahami HAM.* Depok: penerbit RUAS
- Andersen, James. (1987) *Communication Research: Issues and Methods.* New York: McGraw Hill Books.
- Auda, Jasser. (2015) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah.* Terj. Rosidin dan Ali Abd el-mun'im. Bandung. Mizan.
- Azra Awan, Human Right in islam, Why Islam? / [www.whyislam.org](http://www.whyislam.org)
- Baderin, Mashood A. (2003) *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia.* Terj. *International Human Rights and Islamic Law.* Jakarta: KOMNAS HAM
- Bilder, Richard B. (1984) *An Overview of International Human Rights Law, in Hurst Hannum, Guide to International Human Rights Practice,* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Bungin, Burhan. (2001) *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia
- Eriyanto. (2012) *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.* Yogyakarta: LKiS
- Ernst, Carl W. and Martin. Richard C. (eds.), (2010) *Rethinking Islamic Studies.* South Carolina: University of South Carolina.
- Faisal, Sanapiah. (2001) *Format-format Penelitian Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fakih, Mansour. (2013) *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. (2011) *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gilani, Raza Shah. Dkk. (2014) *Islam, Shari'a Laws and International Human Rights Compatibility for Expatriate Business Managers,* Journal of Business Studies Quarterly. Volume 6, Number 2.
- Halim, Fachrizal A. (2002) *Beragama dalam Belenggu Kapitalisme.* Jakarta: IndonesiaTera

- Hanafi, Hasan. Madjid, Nurcholish. Machasin, Dll. (2009) *Islam dan Humanisme: aktualisasi humanism islam di tengah krisis humanism Universal*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Hardiman, F. Budi. (2011) *Hak-hak Asasi Manusia; polemic dengan agama dan kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- <http://www.daulathijau.org/> diakses pada hari jum'at 27 oktober 2017
- <https://tirto.id/dua-konflik-per-hari-catatan-buram-konflik-agraria-di-2017-cCmU>
- Jalil, Abdul. (2008) Tashwirul Afkar: *Gerakan Ulama & Politik Agraria* no. 24. Tanah untuk petani: perspektif fiqih. Jakarta: LAKPESDAMNU.
- K. Denzim, Norman. & S. Lincoln, Yvonna. (ed), (1994) *Handbook of Qualitative Research* London: Sage Publication.
- K.M Smith, Rhona. Hostmaelingen, Njal. Ranheim, Christian. dkk. (2008) *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Kaelan, (2005) *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- latif, Yudi. (2015) *Revolusi Pancasila; kembali ke rel perjuangan bangsa*. Jakarta: Mizan.
- Nasr, Seyyed Hossein. (2003) *Antara Tuhan, Manusia dan Alam; Jembatan Filosofis dan religious menuju puncak Spiritual*. Terj. *The Encounter Man and Nature*. (1984) university of California press. Penerjemah; Ali Noer Zaman. Yogyakarta: IRCiSoD
- Nasution, Bahder Johan. (2014) *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Philips, Abu Aminah Bilal. (2015) *Sejarah & Evolusi Fiqh; Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia & Penerbit Nuansamedia
- Rahman, Fazlur. (2013) *Strategi Cita-cita Islam*, Terj. dari berbagai artikel Fazlur. Yogyakarta: Penerbit Jaya Star Nine
- Ridwan, Nur kholik. (2008) *NU dan Neoliberalisme: tantangan dan harapan menjelang satu Abad*. Yogyakarta: LKiS
- Shiva, Vandhana. (2003) *Water Wars; Privatisasi, profit, dan polusi*. Yogyakarta, Insist Press.
- Sumitro, Warkum. (2016) *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Islam*. Malang: Setara Press
- Turner, B.S. (1996) *Orientalism, Postmodernism & Globalism*. London: Routledgr.
- Pathak, Puneet. (2014) *Human Rights Approach to Environmental Protection*. Ontario International Development Agency.
- Wahid, Hasyim. dkk. (1999) *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS

- Yafie, K.H. Ali. (1995) *Menggagas Fiqh Sosial; dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhwah*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Yafie, K.H. Ali. (2006) *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.

